

**RENCANA STRATEGIS  
2016 - 2021**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIJUNJUNG  
2020**

## KATA PENGANTAR

Rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung merupakan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sijunjung 2016 – 2021 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung selama 5 (lima) tahun kedepan.

Sebagai komitmen bersama dalam proses pencapaian harapan di masa yang akan datang, hendaknya Rencana Strategis ini menjadi arah dan pedoman serta motivasi peningkatan kinerja bagi para karyawan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Muaro Sijunjung, November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN SIJUNJUNG

JAHERP S.Sc.M.Si  
NIP.197303111993031004

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah yang disusun dalam rangka menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung 2016-2021 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Berdasarkan hal tersebut, maka penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung akan menjelaskan arah kebijakan termasuk program dan kegiatan dalam upaya peningkatan investasi di Kabupaten Sijunjung untuk lima tahun mendatang. Selain itu, Renstra Perangkat Daerah akan menjadi pedoman dalam penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setiap tahunnya.

Kegiatan Penanaman Modal merupakan salah satu instrumen dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Perkembangan penanaman modal sangat terkait dengan berbagai faktor yang turut mempengaruhi peningkatan penanaman modal diantaranya adalah potensi sumber daya alam, infrastruktur penunjang maupun iklim penanaman modal yang kondusif. Iklim penanaman modal sangat terkait dengan kebijakan di bidang penanaman modal, baik peraturan dibidang penanaman modal, maupun peraturan pelaksanaannya yang akan berdampak pada sistem dan prosedur pelayanan kepada investor.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan peningkatan pertumbuhan perekonomian tersebut. Oleh karena itu, maka dinilai sangat penting untuk menjabarkan strategi-strategi peningkatan kebijakan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung selama tahun 2016-2021 yang tertuang dalam rencana strategis ini.

Penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah merupakan bagian dari Perencanaan Pembangunan Nasional seperti yang telah diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Di mana Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 86 tahun

2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dimana proses ini tidak terpisahkan dan dilakukan bersama-sama dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2021.

Selain berpedoman pada Permenlagri No. 86 Tahun 2017, secara substansi renstra ini mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Sijunjung 2016-2021 yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 2015-2019, Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi Sumatera Barat 2016-2021 serta berbagai dokumen perencanaan lainnya yang relevan. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mencapai sinergitas dan keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan (baik jangka panjang, menengah dan tahunan) antara berbagai level pemerintahan. Sejalan dengan hal tersebut, Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun 2016 – 2021 diharapkan dapat menjadi dokumen perencanaan publik yang dapat dipertanggung jawabkan realitis dan dapat diimplementasikan.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung ini yaitu :

1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor : 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 6 tahun 2016 tentang Penanaman Modal

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2016-2021
11. Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 46 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung 2016 - 2021 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2021 dan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Sijunjung.

Sedangkan penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP tahun 2016-2021 ini adalah:

1. Untuk mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan di bidang penanaman modal
2. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja setiap tahun dan dalam melakukan evaluasi kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung

### 1.4. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

#### **Bab I Pendahuluan**

Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, serta maksud dan tujuan penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2021.

#### **Bab II Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah**

Menjelaskan secara ringkas mengenai struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi serta gambaran sumberdaya yang dimiliki organisasi. Selain itu juga dijelaskan mengenai potensi tantangan dan peluang yang akan dihadapi dalam kurun lima waktu yang akan datang

#### **Bab III Permasalahan dan isu-isu strategis Perangkat Daerah**

Menjelaskan identifikasi permasalahan, telaah visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sijunjung serta renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal kemudian penentuan isu-isu strategis

**Bab IV Tujuan dan Sasaran**

Menjelaskan tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama dan arah kebijakan yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama lima tahun.

**Bab V Strategi dan Arah Kebijakan**

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun mendatang.

**Bab VI Rencana Program dan Kegiatan Serta Pendanaan**

Menjelaskan rencana program dan kegiatan beserta pendanaan indikatif selama lima tahun ke depan.

**Bab VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan Penanaman Modal**

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

**Bab VIII Penutup**

## BAB II

### GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

#### 2.1. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung nomor 12 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Sesuai dengan Peraturan Daerah tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Dinas PMPTSP dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis dinas
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis dinas.
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas
- d. Pelaksanaan administrasi dinas
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Adapun Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

##### 1. Kepala Dinas.

Mempunyai tugas memimpin, merumuskan kebijakan teknis, menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembinaan dan pelaksana tugas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

##### 2. Sekretaris

Mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkup bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang meliputi urusan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Subbag Umum dan Kepegawaian
- b. Subbag Perencanaan dan Keuangan

### **3. Kepala Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal**

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan deregulasi penanaman modal, perencanaan sektoral dan infrastruktur serta promosi dan kerjasama penanaman modal

Bidang Perencanaan dan Promosi Penanaman Modal terdiri dari

- a. Seksi Deregulasi Penanaman Modal
- b. Seksi Perencanaan Sektoral dan Infrastruktur
- c. Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal

### **4. Kepala Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal**

Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan pemantauan realisasi penanaman modal, pengawasan penanaman modal dan bimbingan/fasilitasi

Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal terdiri dari :

- a. Seksi Pemantauan Realisasi Penanaman Modal
- b. Seksi Pengawasan Penanaman Modal
- c. Seksi Bimbingan dan fasilitasi

### **5. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

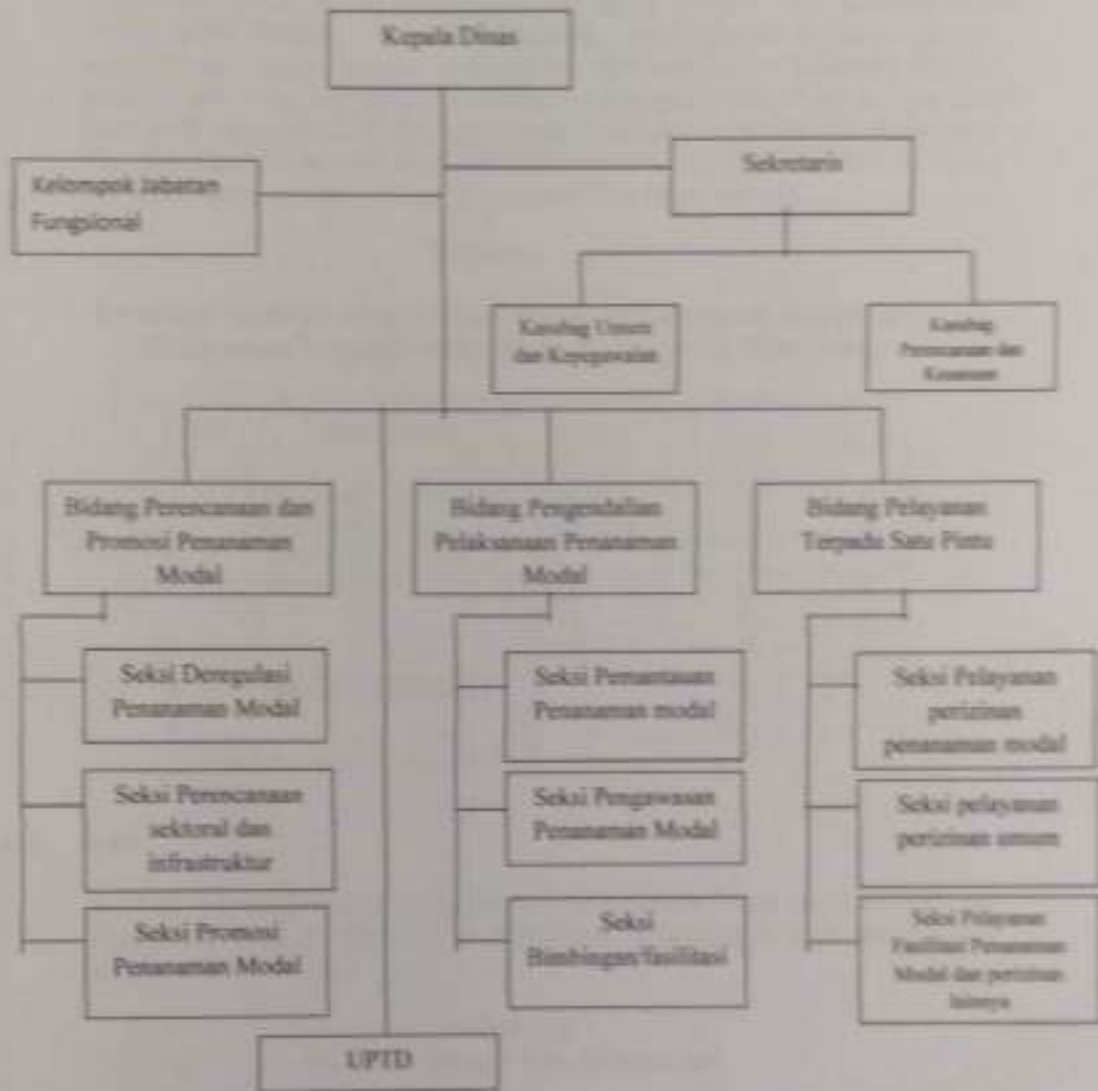
Mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengkoordinasikan mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan program kegiatan layanan Perizinan Penanaman Modal, Layanan Perizinan Umum serta Layanan Fasilitasi Penanaman Modal dan Perizinan lainnya

Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

- a. Seksi Pelayanan Perizinan Penanaman Modal
- b. Seksi Pelayanan Perizinan umum
- c. Seksi Pelayanan Fasilitasi Penanaman Modal dan Perizinan lainnya



**BAGAN STRUKTUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**



## 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

### 2.2.1. Sumber Daya Manusia

Secara umum jumlah pegawai di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung mencapai 43 orang, dengan rincian 25 orang berstatus ASN ( 58,13 persen) dan 18 orang Non PNS ( 41,86 persen). Dari total tersebut, 56,41 persen berjenis kelamin laki-laki dan 43,59 persen perempuan. Sedangkan berdasarkan tingkat pendidikan, yang berpendidikan sarjana (S2) sebanyak 17,95 persen dari total PNS yang ada di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yg berpendidikan terakhir S1, D3 dan SMA masing-masing sebesar 48,71 persen, 5,13 persen dan 28,21 persen.

Tabel 2.1

#### Struktur SDM Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung

NO	Klasifikasi	Uraian	PNS	Non PNS
1	Menurut Jenis Kelamin	Wanita	11	6
		Laki-laki	15	7
2	Menurut Pendidikan	S 2	7	-
		S 1	14	5
		D III	2	-
		SLTA	3	8
		SLTP	-	-
3	Menurut Golongan	IV	3	-
		III	19	-
		II	4	-

### 2.2.2. Aset

Berikut merupakan aset yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung hingga akhir tahun 2016 yang terdiri dari:

Tabel 2.2.  
Kondisi Tanah dan Bangunan

NO	Tanah Bangunan	Lokasi	Luas (m2)	Kondisi	Ket
1	Tanah Bangunan Kantor	Jln Juanda	1.470	Baik	
2	Bangunan Kantor	Jln Juanda	488	Baik	

**Tabel 2.3**  
**Jumlah dan Kondisi Kendaraan Dinas**

NO	Jenis	Merk	Tahun	JML
1	Station Wagon	Toyota Inova	2016	1
2	Station Wagon	Suzuki APV	2016	1
3	Station wagon	Toyota Kijang	2000	1
4	Pick Up	Toyota Hi Lux	2014	1
5	Station wagon	Toyoya Avanza	2011	1
1	Sepeda Motor	Honda/NF 25 TD	2008	1
2	Sepeda Motor	Honda/NF.125 TRF	2009	1
3	Sepeda Motor	Honda/NC110 VARIO	2009	1
4	Sepeda Motor	Honda Supra X	2014	5
5	Sepeda Motor	Vega R	2016	1

**Tabel 2.4**  
**Jumlah dan Kondisi Peralatan Kantor**

NO	Jenis	Kondisi		
		Jumlah	Satuan	Kondisi
1	Alat kantor dan Rumah tangga	195	unit	baik
2	Alat bengkel dan Ukur	2	unit	baik
3	Alat studio dan komunikasi	2	unit	baik

Selain aset-aset tersebut diatas terdapat sarana dan prasarana (Sarpras) kerja lain yang ada di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk menunjang kelancaran tugas antara lain :

- Ruang Pelayanan:  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu didesain dengan ruang pelayanan yang digunakan untuk Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan. Ruang pelayanan didukung dengan fasilitas yang cukup memadai, tertata rapi dan dilengkapi dengan informasi-informasi untuk menciptakan kemudahan dan kenyamanan bagi pemohon.
- Loker Pelayanan:  
Di loket pelayanan petugas siap memberikan berbagai informasi dan pelayanan yang diinginkan oleh pemohon terkait permohonan perizinan dan non perizinan dengan penuh keramahan, berpakaian seragam yang berbeda dilengkapi dengan tanda pengenal, menghilangkan kesan birokrasi dalam proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Sijunjung

- Ruang Pengaduan  
Ruang Pengaduan merupakan salah satu fasilitas yang dapat di gunakan oleh masyarakat jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Kotak Pengaduan  
Kotak Pengaduan merupakan salah satu media atau sumber pengaduan yang dapat di gunakan oleh pemohon izin jika ada keluhan maupun pengaduan terkait pelayanan perizinan dan non perizinan.
- Papan Petunjuk Arah  
Papan Petunjuk Arah disediakan untuk memudahkan pemohon agar tidak merasa bingung saat berada di Gedung Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu .
- Aksesibilitas  
Aksesibilitas disediakan untuk kemudahan penyandang *disabilitas*, atau manula yang menggunakan kursi roda
- Mushola  
Mushola salah satu sarana yang disediakan untuk pegawai, pemohon izin, tamu yang ingin menjalankan ibadah sholat di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Ruang Laktasi  
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menyediakan Ruang Laktasi yang disediakan untuk pegawai maupun pemohon yang ingin memberikan ASI pada bayinya.

### 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dapat dilihat dari capaian indikator kinerja baik dari indikator kinerja kunci maupun indikator kinerja lainnya seperti indikator kinerja utama, dan indikator kinerja dalam RPJMD periode sebelumnya. Selain itu kinerja pelayanan Perangkat Daerah dapat dilihat dari sejauhmana serapan anggarannya.

Capaian kinerja pelayanan dan serapan anggaran urusan penanaman modal selama lima tahun sebagai berikut berikut:

#### a. Perkembangan jumlah Investor

Perkembangan jumlah investor memperlihatkan keberminatan para pemilik modal untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Sijunjung. perkembangan jumlah investor sangat dipengaruhi oleh iklim investasi di Kabupaten Sijunjung selain juga dipengaruhi oleh promosi yang dilakukan, jumlah investor yang memiliki izin prinsip dari tahun 2010 sampai dengan 2015 dapat dilihat pada table berikut ini :

**Tabel 2.5-  
JUMLAH INVESTOR (PMDN/PMA)**

NO	TAHUN	PMDN	PMA
1	2010	10	-
2	2011	25	2
3	2012	12	1
4	2013	15	1
5	2014	18	1
6	2015	15	1
	Jumlah	95	5

**b. Pencapaian Rencana dan Realisasi PMA dan PMDN.**

Kegiatan Penanaman Modal dan Perizinan merupakan salah satu kegiatan strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibutuhkan investasi yang besar. Investasi yang besar memerlukan mobilitas sumber - sumber pembiayaan investasi secara terencana dan terpadu. Memperhatikan kemampuan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam membiayai pembangunan sangat terbatas, maka pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada masyarakat dan swasta untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pembangunan ekonomi melalui kegiatan investasi. Selama kurun waktu tahun 2010 - 2015 penanaman modal di Kabupaten Sijunjung mengalami peningkatan seperti yang disajikan pada Tabel 2.6.

**Tabel 2.6  
Rencana dan Realisasi PMA dan PMDN**

NO	TAHUN	RENCANA INVESTASI	REALISASI INVESTASI
1	2011	48.755.828.820	11.131.200.000
2	2012	23.566.048.775	1.284.000.000
3	2013	577.382.700.000	510.200.000
4	2014	3.189.971.400.000	11.970.623.207,-
5	2015	588.187.300.000	657.500.571.461,-

**c. Perkembangan PMDN Dilihat dari Lokasi 2010 -2015**

Usaha-usaha untuk pemerataan pertumbuhan investasi antar wilayah sudah mulai menunjukkan hasil, tahun 2010 s/d 2015 investasi sudah mulai tumbuh di seluruh Kecamatan , sebagaimana tertuang pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.7**  
**Data PMDN berdasarkan lokasi**

NO	KECAMATAN	JUMLAH PERUSAHAAN YANG MEMILIKI IZIN PRINSIP
1	Sijunjung	22
2	Koto VII	7
3	Sumpur Kudus	2
4	Tanjung Gadang	9
5	Labuk Tarok	3
6	Kupitan	3
7	IV Nagari	7
8	Kamang Baru	54

**d. Perkembangan Investasi Dilihat dari Sektor**

Tampak Penanaman Modal banyak yang bergerak di sektor konstruksi dan jasa, seperti tampak pada tabel dibawah ini :

**Tabel 2.8**  
**Data Bidang Usaha PMDN dan PMA**

No	Bidang Usaha	PMDN	PMA
1	Industri Kayu	19	1
2	Industri Kimia dasar, barang kimia dan farmasi	5	-
3	Industri makanan	3	-
4	Industri mineral non logam	7	1
5	Konstruksi	31	-
6	Perdagangan dan Reparasi	18	1
7	Pertambangan	11	2
8	Tanaman pangan dan perkebunan	10	-
9	Kehutanan	-	1
10	Industri barang lainnya dari kayu	-	1
11	Jasa	34	1

**e. Kinerja Pelayanan Perizinan**

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selain menyelenggaraan pelayanan urusan penanaman modal juga mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada masyarakat melalui unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Kinerja pelayanan perizinan melalui unit Pelayanan Terpadu Satu Pintu diketahui melalui Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) terhadap pelayanan perizinan yang diberikan kepada masyarakat.

Angka Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) tahun 2015 adalah : 74,70

#### f. Kinerja serapan anggaran

Dari sisi kinerja keuangan selama tahun 2010 - 2015 menunjukkan realisasi serapan anggaran rata - rata diatas 90 persen. Dengan capaian kinerja yang tinggi dan disertai oleh serapan anggaran tidak seratus persen dapat mengindikasikan penghematan anggaran dan kinerja perencanaan yang baik sebagaimana table dibawah ini

**TABEL 2.9**  
**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN**

NO	TAHUN ANGGARAN	ALOKASI (Rp)	REALISASI (Rp)	KINERJA (%)
1	2010	196.624.900	168.802.140	85,85
2	2011	187.770.970	166.658.100	88,75
3	2012	189.847.500	178.843.150	94,20
4	2013	464.191.000	438.418.450	94,44
5	2014	1.032.902.890	881.840.665	85,37
6	2015	900.961.030	851.360.675	94,49
J U M L A H		2.972.298.290	2.685.923.180	90,36

#### 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung mempunyai program kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peningkatan pelayanan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung. Hal ini didasarkan pada program pelayanan pada periode 2011-2015. Program tersebut menjadi tantangan dan peluang untuk pengembangan pada periode lima tahun mendatang.

Tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Sijunjung adalah sebagai berikut.:

##### 1. Faktor Internal

###### 1). Kekuatan:

- a) Tersedianya regulasi untuk melaksanakan kewenangan dibidang Penanaman Modal dan Perizinan;
- b) Adanya dukungan/komitmen pimpinan dan pegawai dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat/ pemohon izin;
- c) Adanya kelembagaan PTSP yang dibentuk untuk memberikan kemudahan pelayanan perizinan dan nonperizinan kepada penanam modal.

2). Kelemahan:

- a) Kuantitas/kompetensi aparatur dalam penanganan penanaman modal dan perizinan belum optimal dan belum memadai;
- b) Koordinasi antar bidang belum optimal;
- c) Belum tersedianya sistem perizinan online

2. Faktor Eksternal

1). Peluang

- a) masih tingginya kepercayaan dan minat penanam modal untuk berinvestasi di Kabupaten Sijunjung ;
- b) adanya dukungan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi dan Pemangku Kepentingan (*stakeholder*).
- c) kondisi lingkungan internal yang positif terhadap investasi
- d) Tersedianya sumber daya daerah yang meliputi masyarakat, alam, maupun berbagai potensi usaha masyarakat yang masih belum dikembangkan secara optimal.
- e) Banyaknya lahan yang belum dimanfaatkan masyarakat sehingga dapat menjadikan modal daerah untuk menarik minat para investor yang ingin mengembangkan usahanya di Kabupaten Sijunjung

2). Ancaman

- a) Kebutuhan penanam modal akan informasi yang diperlukan untuk melakukan investasi belum terpenuhi;
- b) Pemahaman penanam modal terhadap ketentuan di bidang Penanaman Modal dan Perizinan masih rendah;
- c) Keterbatasan infrastruktur untuk mewujudkan target pemerataan penanaman modal

Memperhatikan tantangan dan peluang di atas, DPMPTSP sebagai perangkat daerah yang memiliki peranan penting dan strategis dalam upaya mendorong peningkatan penanaman modal harus lebih responsif, pro-aktif, ramah, dan customer oriented dalam memberikan pelayanan kepada para stakeholders penanaman modal. Hal tersebut harus tercermin dalam penyusunan kerangka regulasi dan kelembagaan yang efektif dan efisien.



### BAB III

## PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

### 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan dokumen perencanaan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan terhadap analisis lingkungan eksternal dalam proses penyusunan perencanaan. Apabila dinamika eksternal khususnya 5 (lima) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik, maka Perangkat Daerah akan dapat mempertahankan dan bahkan meningkatkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dimasa datang.

Suatu isu strategis bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diperoleh baik berasal dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di masa lima tahun mendatang.

Adapun permasalahan pembangunan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Program dan Kegiatan.
2. Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas guna peningkatan produktivitas dan kinerja Aparatur secara optimal
3. Peluang dan potensi investasi yang dimiliki Kabupaten Sijunjung belum optimal dipromosikan kepada calon-calon investor
4. Masih rendahnya kesadaran penanam modal untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM);
5. Masyarakat belum dapat mengakses pelayanan perizinan yang mudah dan cepat melalui sistem elektronik.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan-permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1  
 Faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan

NO	PERMASALAHAN	FAKTOR YG MEMPENGARUHI
1	Keterbatasan Sarana dan Prasarana Pemunjang Program dan Kegiatan	Anggaran yang disediakan untuk melaksanakan program dan kegiatan terbatas
2	Keterbatasan SDM baik kualitas maupun kuantitas guna peningkatan produktivitas dan kinerja Aparatur secara optimal	Minimnya kegiatan bintek, sosialisasi maupun diklat yang dilaksanakan oleh pusat maupun propinsi untuk menunjang tugas dan fungsi
3	Peluang dan potensi investasi yang dimiliki Kabupaten Sijunjung belum optimal dipromosikan kepada calon-calon investor	Kurangnya promosi dan publikasi
4	Masih rendahnya kesadaran penanam modal untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Pemananan Modal (LKPM);	Kurangnya sosialisasi atau pembekalan yang diberikan kepada penanam modal untuk membuat LKPM
5	Masyarakat belum dapat mengakses pelayanan perizinan yang mudah dan cepat melalui sistem elektronik	Belum tersedianya Sistem Informasi Pelayanan Perizinan secara elektronik yang memudahkan pemohon mengakses pelayanan perizinan

### 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut.

Hasil identifikasi Perangkat Daerah tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Perangkat Daerah. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan terhadap kesenjangan pelayanan, tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.

Visi Pemerintah Kabupaten Sijunjung yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung 2016-2021 adalah : **" Terwujudnya Nagari Madani yang Maju, Jaya, Adil dan Sejahtera "** dengan misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Kuat dan Sejahtera
2. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang kuat, cerdas dan berakhlak mulia
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan merata
4. Mewujudkan pemerintahan yang bekerja dan melayani
5. Mengoptimalkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan
6. Melakukan revitalisasi adat dan budaya berlandaskan adat basandi syara, syara basandi kitabullah

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mendukung misi kesatu yaitu **Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Kuat dan Sejahtera** dan misi keempat yaitu **Mewujudkan Pemerintahan yang bekerja dan melayani**

Misi ke-satu memiliki tujuan:

1. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas dan lebih merata berbasis ekonomi kerakyatan
2. Kedaulatan pangan, pengembangan agribisnis dan kesejahteraan pertanian
3. Meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Sosial Budaya serta Percepatan Pengembangan Usaha Ekonomi Sektor lainnya

Adapun misi ke-empat memiliki tujuan :

1. Meningkatkan Aparatur Pemerintahan yang Profesional
2. Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih, Transparan dan Akuntabel

Sedangkan prioritas pembangunan daerah sebagai penjabaran dan operasional misi kesatu dan keempat yang dirumuskan dalam RPJMD Kab Sijunjung 2016-2021 dan menjadi kewajiban Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dilaksanakan adalah **prioritas ekonomi yang berdaya saing tinggi dan Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah**

Misi, tujuan, sasaran dan prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk dilaksanakan adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Misi, Tujuan, Sasaran, Prioritas Dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung**  
**2016-2021 terkait Penanaman Modal**

Misi	Tujuan	Sasaran	Prioritas
Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Kuat, berdaya saing tinggi dan Sejahtera	Mewujudkan pembangunan Ekonomi yang berkualitas berbasis ekonomi kerakyatan	Meningkatnya daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi	Ekonomi yang berdaya saing tinggi
Mewujudkan Pemerintahan yang Bekerja dan Melayani	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Daerah

Adapun faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Penanaman Modal dan PTSP yang dapat mempengaruhi pencapaian visi, misi kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3.**  
**Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan SKPD terhadap Pencapaian Visi,**  
**Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Maju, Jaya, Adil dan Sejahtera				
No.	Misi dan Program KDH dan Wakil KDH terpilih	Permasalahan pelayanan OPD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi ke 1 : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Kuat dan Sejahtera	Data realisasi investasi belum optimal dapat disajikan	Belum seluruhnya Penanam Modal menyampaikan LPKM	Terdapat kegiatan pemantauan dan pembinaan penanaman modal
2	Misi ke 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang bekerja dan melayani	Belum optimalnya pelayanan perizinan yang dapat diberikan	Terbatasnya kualitas SDM, sarana dan prasarana pendukung pelayanan perizinan	Adanya komitmen dari seluruh jajaran di Dinas PMP

### 3.3. Telaahan Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi Sumatera Barat

Telaah terhadap rencana strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ) tahun 2015-2019 dan dan Renstra DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat ditujukan untuk melakukan sinergitas dan sinkronisasi antar level kabupaten dengan propinsi dan nasional. Penyelarasan renstra antar lembaga terutama dengan lembaga induk dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh

Adapun arah kebijakan dan strategi dalam Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 3.4.**  
**Arah Kebijakan dan Strategi Badan Koordinasi Penanaman Modal**

No	SASARAN	ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
1	<p>1. Menurunnya waktu pemrosesan perizinan investasi nasional di pusat dan di daerah menjadi maksimal 15 hari per jenis perizinan pada tahun 2019.</p> <p>2. Menurunnya waktu dan jumlah prosedur untuk memulai usaha (<i>starting a business</i>) menjadi 7 hari dan menjadi 5 prosedur pada tahun 2019, sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan peringkat Indonesia pada <i>Ease of Doing Business</i> (EoDB).</p> <p>3. Meningkatnya pertumbuhan investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) menjadi</p>	<p>1. Peningkatan Iklim Investasi Dan Iklim Usaha</p> <p>2. Peningkatan Investasi Yang Inklusif Terutama Dari Investor Domestik</p>	<p>a. Peningkatan kepastian hukum terkait investasi dan usaha,</p> <p>b. Penyederhanaan prosedur perizinan investasi dan usaha di pusat dan daerah, terutama untuk sektor pengolahan dan jasa, antara lain: sektor migas, jasa transportasi laut, serta sektor industri manufaktur berbasis sumber daya alam.</p> <p>c. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha</p> <p>d. Pemberian insentif dan fasilitasi investasi (berupa: insentif fiskal dan non fiskal) yang lebih selektif dan proses yang transparan</p> <p>e. Pendirian Forum Investasi, yang beranggotakan lintas kementerian dan lintas pemangku kepentingan</p>

<p>sebesar 12,1% pada tahun 2019.</p> <p>4. Meningkatnya investasi PMA dan PMDN menjadi Rp 933 triliun pada tahun 2019 dengan kontribusi PMDN yang semakin meningkat menjadi 38,9%.</p>		<p>yang secara rutin mengadakan pertemuan untuk memonitor, mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor.</p> <p>e. Peningkatan iklim ketenagakerjaan yang lebih kondusif dan menciptakan hubungan industrial yang harmonis</p> <p>f. Peningkatan persaingan usaha yang sehat melalui pencegahan dan penegakan hukum persaingan usaha dalam rangka penciptaan kelembagaan ekonomi yang mendukung iklim persaingan usaha yang sehat, penyehatan struktur pasar serta penguatan sistem logistik nasional yang bertujuan menciptakan efisiensi yang berkeadilan,</p>
---	--	--

Secara umum sasaran jangka menengah Renstra DPMPTSP Kab Sijunjung selaras dengan sasaran Renstra Badan Koordinasi Penanaman Modal ( BKPM ), adapun faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan DPMPTSP ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra BKPM adalah belum dimanfaatkannya teknologi informasi oleh DPPTSP Kab. Sijunjung untuk menurunkan waktu pemrosesan perizinan

Penyusunan rencana strategis DPMPTSP Kabupaten Sijunjung juga perlu diselaraskan dengan arah dan kebijakan DPMPTSP Propinsi Sumatera Barat. Penyelarasan renstra dianggap sebagai salah satu faktor penentu kesuksesan rencana secara strategis dan menyeluruh. Selain itu, penyelarasan ini dilakukan agar tidak terdapat rencana yang tumpang-tindih dan kontradiktif antar DPMPTSP Propinsi dan Kabupaten.

Adapun tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Propinsi Sumatera Barat yang menunjukkan keselarasan dengan arah kebijakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sijunjung adalah sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini

Tabel 3.5  
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan DPM & PTSP  
 Propinsi Sumatera Barat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan perbaikan iklim investasi dan mengoptimalkan kapasitas lembaga	Meningkatnya realisasi investasi di Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan realisasi investasi dengan efektifitas pelaksanaan pemantauan, pembinaan dan pengawasan</li> <li>2. Melakukan promosi investasi secara kreatif dan komprehensif dengan mengedepankan unsur stabilitas dan potensi daerah</li> <li>3. Menyiapkan database investasi berupa profil potensi dan peluang investasi secara lengkap dan dapat diperbaharui setiap periode</li> <li>4. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan aparatur di bidang penanaman modal</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal</li> <li>2. Peningkatan upaya promosi investasi</li> <li>3. Pemberian kemudahan dan fasilitas investasi</li> <li>4. Peningkatan kerjasama dalam penanaman modal</li> <li>5. Peningkatan kualitas data dan informasi potensi dan peluang investasi</li> <li>6. Peningkatan efektifitas dan efisiensi SOP</li> <li>7. Peningkatan kompetensi aparatur dan penyediaan sarana dan prasarana</li> </ol>
Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal secara profesional	Meningkatnya kualitas pelayanan Terpadu satu pintu	Mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, efektif dan transparan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan layanan investasi berbasis teknologi informasi</li> <li>2. Pengembangan layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian dan transparansi proses perizinan</li> <li>3. Pembinaan layanan perizinan</li> </ol>

### 3-4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Disadari bahwa penanaman modal membutuhkan infrastruktur dan daya dukung Sumber Daya Alam (SDA) maupun SDM yang memadai; bila salah satu tidak tersedia, maka potensi yang ada di daerah akan sulit berkembang. Terkait dengan infrastruktur, permasalahan penanaman modal sangat bersinggungan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Lemahnya implementasi RTRW membuat daya saing penanaman modal menjadi rendah.

Prioritas penanaman modal seperti yang ditegaskan dalam RUPM yaitu pangan, energi, dan infrastruktur perlu terus dikembangkan dengan mengarah pada peningkatan nilai tambah produk. Misalnya saja dalam hal pangan, sektor agribisnis sangat penting untuk dikembangkan ke depan.

RTRW harus diimplementasikan dengan baik agar lahan pertanian terselamatkan dari modernisasi pembangunan. Disadari pula bahwa Renstra dapat mendorong sektor-sektor penanaman modal yang mampu mempercepat terjadinya pemerataan penanaman modal. Dengan fokus pada sektor yang mendorong pemerataan, maka pertumbuhan penanaman modal akan cepat dicapai.

Menyangkut kegiatan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung, terdapat dua masalah utama, yaitu bagaimana menumbuhkan penanaman modal baru dan bagaimana memantapkan kegiatan penanaman modal yang sudah ada dalam jangka panjang.

### 3-5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Dalam menentukan isu strategis yang sedang berkembang, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung menggunakan metode analisa Teori SWOT untuk menentukan isu strategis yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasinya selama jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan berbagai permasalahan aspek pelayanan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telaah visi dan misi Kepala daerah, telaah renstra BKPM dan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi Sumatera Barat, maka isu-isu strategis yang diprioritaskan penanganannya, sebagai peluang pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang adalah sebagai berikut.

1. Belum optimalnya promosi terhadap peluang dan potensi investasi daerah, baik penyediaan media promosi, maupun strategi pemasaran investasi
2. Belum optimalnya pengendalian terhadap pelaksanaan penanaman modal dalam rangka mengatasi permasalahan investasi, dan mencari solusi



terbaik agar dapat terus menjaga iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif bagi pelaku usaha dan investor

3. Belum maksimalnya ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan dalam rangka layanan investasi yang memberikan kemudahan, kepastian, dan transparansi proses perizinan bagi investor dan pengusaha

## BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

### 4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada analisis isu-isu strategis,

Pencapaian visi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Sijunjung periode 2016-2021 oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan difokuskan untuk mendukung pelaksanaan Misi ke 1 yaitu *Mewujudkan Perekonomian Masyarakat Yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi dan Sejahtera* dan Misi ke 4 yaitu *Mewujudkan Pemerintahan Yang Bekerja dan Melayani*

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun ke depan didasarkan pada hasil identifikasi potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan misi ke satu dan misi ke empat dari RPJMD periode 2016-2021. Berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan PTSP menetapkan tujuan yang akan dicapai sebagai berikut :

#### 1. Meningkatnya Investasi Daerah

Tujuan ini diarahkan pada upaya meningkatkan daya tarik investasi dan realisasi investasi di Kabupaten Sijunjung melalui strategi promosi penanaman modal yang berkualitas, peningkatan kualitas penyelenggaraan pameran, penyediaan sarana promosi penanaman modal, peningkatan penyediaan kualitas Informasi potensi investasi, pemetaan dan perencanaan pengembangan penanaman modal serta peningkatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dalam rangka meningkatkan realisasi investasi di Kabupaten Sijunjung

#### 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

Tujuan ini disusun dalam rangka memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan perizinan melalui kemudahan, kepastian dan transparansi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan dengan mengembangkan sistem pelayanan perizinan secara elektronik untuk mendukung penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta meningkatkan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur perizinan dan non perizinan

Dalam upaya mencapai tujuan diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu juga menetapkan indikator kinerja dari

tujuan-tujuan tersebut sebagai ikhtisar sasaran berbagai program dan kegiatan yang dilakukan melalui penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Indikator-indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.1.

**Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Tujuan	Sasaran	Indikator	Target kinerja tahun ke				
			1	2	3	4	5
Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya potensi dan Peluang Investasi	Jumlah Potensi dan Peluang Investasi Daerah yang dikembangkan	1	1	1	1	1
		Jumlah Tarik Investor yang berinvestasi di daerah (PMDN)	104	114	124	134	144
		Jumlah Investor yang berinvestasi di daerah (PMA)	7	8	9	10	11
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat Sektor Perizinan dan Non Perizinan	Nilai IKM Sektor Perizinan dan Non Perizinan	75	76,75	78,75	80,71	82,00
Meningkatnya Kinerja Organisasi	Meningkatnya Akuntabilitas Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	63	65	70	71	75

## BAB V

### STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

#### 5.1. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Strategi dan kebijakan dalam rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PMPTSP yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD Kabupaten Sijunjung tahun 2016-2021 dan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sebagai penjabaran Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung, maka ada beberapa strategi dan arah kebijakan yang diambil agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik:

1. Memperbaiki iklim investasi
2. Mengidentifikasi potensi investasi;
3. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dan
4. Memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan

Tabel 5.1 menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenaan dengan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan perangkat daerah.

**Tabel 5.1**  
**Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**

<b>Visi : Terwujudnya Nagari Madani yang Maju, Jaya, Adil dan Sejahtera".</b>				
<b>Misi ke 1 : Mewujudkan Perekonomian Masyarakat yang Kuat, Berdaya Saing Tinggi dan Sejahtera</b>				
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	Indikator Kinerja
1. Meningkatnya Investasi Daerah	Meningkatnya Potensi Investasi Daerah yang dikembangkan.	1. Memperbaiki iklim investasi 2. Mengidentifikasi potensi investasi	1. Pelaksanaan Deregulasi dan harmonisasi regulasi perizinan dan penanaman modal 2. Peningkatan kualitas penyajian promosi investasi 3. Pemberian kemudahan dan insentif kepada investor	Jumlah Potensi Daerah
	Meningkatnya Investor	1. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan penanaman modal	1. Peningkatan pengawasan, pemantauan dan pemberian bimbingan 2. Fasilitasi permasalahan investasi	Jumlah Investor yang berinvestasi ke daerah
<b>Misi ke 4 : Mewujudkan Pemerintahan yang Bekerja dan Melayani</b>				
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan	1. Memaksimalkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan perizinan	1. Peningkatan kualitas layanan perizinan 2. Pemanfaatan teknologi informasi	Indeks Kepuasan Masyarakat

## BAB VI

### RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini disajikan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, target sasaran, dan pendanaan indikatif yang merupakan penjabaran dari tabel 5.1 yang menjelaskan tentang strategi dan kebijakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Indikator kinerja program menunjukkan capaian keberhasilan program yang mencerminkan outcome. Sedangkan indikator kinerja kegiatan menunjukkan keluaran (output) dari kegiatan yang dilaksanakan.

Data capaian pada tahun awal perencanaan menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2015 dan proyeksi capaian tahun 2021. Target kinerja program/ kegiatan yang bersifat persentase atau rasio, pada akhir tahun renstra menunjukkan capaian pada tahun ke-5. Sedangkan target kinerja program/ kegiatan yang bersifat angka absolut, kondisi pada akhir tahun renstra menunjukkan akumulasi dari capaian setiap tahunnya. Adapun secara rinci disajikan melalui tabel 6.1 sebagai berikut :



Peta	Asesmen	Indikator	TABEL 1. REKORD PENCAPAIAN											Revisi/Target Baru/Target Sementara							
			Tahap 1 (10000)		Tahap 2 (10000)		Tahap 3 (10000)		Tahap 4 (10000)		Tahap 5 (10000)		Berkas/Target Baru/Target Sementara		Tipe	Kategori					
			Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian							
1. Identifikasi masalah	1. Identifikasi masalah	1. Identifikasi masalah	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	
2. Analisis masalah	2. Analisis masalah	2. Analisis masalah	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	
3. Perencanaan masalah	3. Perencanaan masalah	3. Perencanaan masalah	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	10000	0%	











No	Nama	Jenis Kelamin	Tahun 2011		Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Keterangan
			Januari	Februari	Januari	Februari	Januari	Februari	Januari	Februari	
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
37	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
38	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
39	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
40	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
41	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
42	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
43	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
44	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
45	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
46	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
47	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
48	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
49	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
50	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

## BAB VII

### KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung mendukung tercapainya tujuan *Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkualitas berbasis ekonomi kerakyatan* dan sasaran *Meningkatnya Daya Saing Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi* dan sasaran *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik*

Tabel di bawah ini menunjukkan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sijunjung, tahun 2016-2021.

**Tabel 7.1.**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD 2015	Target Capaian Kinerja Tahunan						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2021)
			2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Realisasi investasi PMDN (Rp. juta)	957.631	1.279.875	2.029.875	4.279.875	5.779.875	7.279.875	8.779.875	8.779.875
2	Realisasi investasi PMA US\$	-	-	38.000	76.000	114.000	152.000	190.000	190.000

## BAB VIII

### PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung merupakan rumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sijunjung 2016 – 2021 yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung selama 5 (lima) tahun kedepan.

Cakupan dari Rencana Strategis ini telah diupayakan memuat seluruh aspek yang diharapkan dapat memberikan jawaban sekaligus solusi bagi peningkatan penanaman modal di Kabupaten Sijunjung.

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu periode tahun 2016-2021 menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.

Keberhasilan pelaksanaannya sangat ditentukan oleh kesiapan aparatur, kelembagaan, dan pendanaan, serta komitmen seluruh jajaran Dinas PMPTSP Kabupaten Sijunjung.

Renstra ini disusun dan disajikan secara ringkas dengan harapan agar dapat memberikan informasi yang cukup memadai mengenai rencana peningkatan investasi di Kabupaten Sijunjung.

Sistematika Renstra ini telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Dan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021.